

- Adi Nugroho, Susanti. (2018). *Hukum Kepailitan Dalam Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta : Pranadamedia Group.
- Anoraga, Panji, dan Ninik. (2007). *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Beni Kurniawan, M. (2017). *Redefinisi Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Kepailitan PT. Istaka Karya Ditinjau Dari Three Keyword Theory*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 11 No. 3 Nopember.
- Chairanie, R. and Afriana, A. (2021). Kedudukan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Kreditor Pada Koperasi Simpan Koperasi Pandawa Mandiri Group Yang Telah Dinyatakan Pailit Atas Disitanya Boedel Pailit Oleh Negara. Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, 4(1), pp.1-18.
- Dwi Harjamukti, Susi. (2011). *Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum UNPAD.
- G. Kartasapoetra, A. Bambang S dan A. Setiady. (2003). *Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hatta, Muhammad. (1959). *Naskah Persiapan UUD 1945 Jilid Pertama*. Jakarta: Sekneg.
- H. Yuhelson. (2023). *Kepastian Hukum Perdamaian Dalam Kepailitan*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Hendrojogi. (2000). *Koperasi Asas-Asas, Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Itang. (2016). *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Kartasaputra, G. (2001). *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartasapoetra. (2003). *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta : Bina Adi Raksa.
- M. Burhan Bungin. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana Prenada.
- M. Sinaga, Syamsudin. (2012) *Hukum Kepailitan*. Jakarta : PT. Tatanusa.
- Moleong. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Nugroho. (2018). *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta : Pranadamedia Group.

- Ridwan. (2014). *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta : FH UII Perss.
- R.T Sutantya Rahardja, Hadhikusuma. (2005). *Koperasi Indonesia*. Jakarta : PT. Rajawali Pers.
- Sitio, Arifin. (2001). *Koperasi, Teori dan Parktik*. Jakarta : Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : UII Perss.
- Sunggono, Bambang. (1997) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2016). *Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Jakarta : Kencana.

Peraturan :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 Juli 1965.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2006.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Internet :

[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188380&val=6466&title=KE DUDUKAN%20SURAT%20EDARAN%20MAHKAMAH %20AGUNG%20%29%20DALAM%20HUKUM%20POSITIF%20DI%20INDONESIA](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188380&val=6466&title=KE%20DUDUKAN%20SURAT%20EDARAN%20MAHKAMAH%20AGUNG%20%29%20DALAM%20HUKUM%20POSITIF%20DI%20INDONESIA), diakses pada tanggal 22 September 2023, pukul : 08.20 WIB.